



**Judul** : Tindak tegas pejabat tidak netral  
**Tanggal** : Kamis, 02 November 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 1

# Tindak Tegas Pejabat tidak Netral

*Menteri dan wakil menteri yang terlibat pemenangan capres-cawapres semestinya mengundurkan diri.*

**SRI UTAMI**  
[am@mediaindonesia.com](mailto:am@mediaindonesia.com)

**I**MBUAAN Presiden Joko Widodo kepada pejabat negara agar menjaga netralitas nyatanya cuma sekadar pernyataan normatif tanpa taj. Yang mengental di lapangan justru fakta-fakta yang memperlihatkan ketidaknetralan sejumlah pejabat pemerintah dan pemantu Presiden.

Beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Palman Raharjo, tertangkap video sedang berorasi untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Meski ia mengaku saat itu tidak dalam kapasitasnya sebagai wakil menteri, tetap

saja ajakan itu dinilai tak etis karena jabatan publiknya tetap melekat.

Sebelumnya, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni membuat postingan terkait kunjungan dinasnya ke Kupang, Nusa Tenggara Timur di akun X. Yang menjadi soal, pada postingan itu ia menyertakan hastag Prabowo-Gibran.

Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, menyebut semua itu mengindikasikan ketidaknetralan yang sangat terbuka dilakukan para pejabat pemerintah. Perilaku tersebut, menurutnya, mencedera integritas pemilu. "Itermasuk pencopotan baliho (Ganjar-Mahfud) di Bali, semua merusak integritas pemilu," jelasnya, kemarin.

Todung menekankan tindakan seperti itu tidak boleh di biarkan pemerintah karena akan menimbulkan situasi yang tidak sehat dalam kontestasi politik. Dia mengkhawatirkan adanya regulasi dan tindakan yang bersifat *abuse of power*.

"Saya mengimbau semua pejabat pemerintah betul-betul tegak lurus pada prinsip pemilu yang jurdil. Jangan ada tindakan yang melanggar asas netralitas. Presiden harus memindak mereka yang melanggar asas netralitas," tegasnya.

Senada, Direktur Lingkar Madani (LJMA) Ray Rangkuti menyatakan para menteri dan wakil menteri yang terlibat pemenangan capres sebaiknya mengundurkan diri. Pengunduran diri itu penting untuk menjaga komitmen pemerintah bersikap netral dalam Pemilu 2024. "Lebih khusus bagi menteri yang merupakan calon presiden atau wakil presiden,"

tegasnya.

Ray juga mempertanyakan netralitas Jokowi yang masih kerap bertemu atau memobilisasi relawan. Terakhir, diheratkan Presiden menyambangi relawan pendukungnya yang tergabung dalam Arus Bahau Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Bali, Selasa (31/10).

Menurut Ray, kunjungan Presiden ke Bali merupakan kunjungan resmi kenegaraan. Semestinya semua kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas kenegaraan

## Klarifikasi baliho

Terkait dengan ramainya pemberitaan tentang pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di beberapa titik yang akan dilewati Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Bali, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengklarifikasi bahwa langkah itu diambil semata untuk menjaga estetika.

"Yang dilakukan telah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho tersebut agar estetika terjaga," ujar Mahendra.

Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingarkan saat ini rakyat sangat cerdas dan menjadi instrumen penting untuk memastikan pemilu berjalan adil, demokratis, tanpa *abuse of power*. "Penurunan baliho PDIP secara sepihak lalu muncul atribut secara masif dari partai lain, tentu menimbulkan kecurigaan publik," ujarnya. (Ykb/Ant/X-3)